



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN URUSAN PEMERINTAHAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM
DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN
2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN URUSAN PEMERINTAHAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2013-2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan dan Litbang adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
6. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2018.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra.
19. Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Penyesuaian Urusan Pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 meliputi:

- a. urusan pemerintahan wajib;
- b. urusan pemerintahan pilihan; dan
- c. unsur penunjang urusan Pemerintahan.

Pasal 3

Penyesuaian Perangkat Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 berjumlah 52 (lima puluh dua) Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penyesuaian Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 berupa penyesuaian target capaian sasaran tahunan.

Pasal 5

Penyesuaian Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 6 Februari 2017

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 6 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TANGGAL 6 FEBRUARI 2017
TENTANG
PENYESUAIAN URUSAN PEMERINTAHAN,
PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2013-2018

DOKUMEN PENYESUAIAN URUSAN PEMERINTAHAN, PERANGKAT DAERAH,
PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2013-2018

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

DOKUMEN PENYESUAIAN URUSAN PEMERINTAHAN, PERANGKAT DAERAH,
PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2013-2018

BAB I
PENDAHULUAN

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, konstruksi penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahan yang cukup signifikan berkaitan dengan pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana beberapa urusan yang selama ini menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dialihkan menjadi Urusan Provinsi dan Pusat. Peralihan kewenangan ini ditindaklanjuti dengan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka adalah mulai dari Penataan urusan, penilaian intensitas urusan pemerintahan yang meliputi penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah. Ada beberapa perangkat daerah yang menjadi kewenangan pusat / provinsi dilakukan penghapusan atau penggabungan Perangkat Daerah, serta adanya pembentukan Perangkat Daerah baru.

Intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut berdampak terhadap manajemen perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari penyusunan dan penetapan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan anggaran.

Untuk itu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dimaksud, terkait pembentukan Perangkat Daerah (yang lama dan yang baru), program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta target kinerja pembangunan yang ditetapkan untuk dicapai.

BAB II

PENYESUAIAN URUSAN PEMERINTAHAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2013-2018

A. Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan urusan yang sebelumnya terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan mengalami penyesuaian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa pelaksanaan urusan terdiri dari urusan wajib yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar; urusan pilihan dan unsur penunjang urusan pemerintahan. Urusan Pemerintahan dimaksud sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- 1.01 Pendidikan
- 1.02 Kesehatan
- 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- 1.06 Sosial

II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- 2.01 Tenaga Kerja
- 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.03 Pangan
- 2.04 Pertanahan
- 2.05 Lingkungan Hidup
- 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil
- 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.09 Perhubungan
- 2.10 Komunikasi dan Informatika
- 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.12 Penanaman Modal

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

2.14 Kebudayaan

2.15 Perpustakaan

2.16 Kearsipan

III. Urusan Pilihan

3.01 Kelautan dan Perikanan

3.02 Pariwisata

3.03 Pertanian

3.04 Perdagangan

3.05 Perindustrian

3.06 Transmigrasi

IV. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

4.01 Perencanaan

4.02 Keuangan

4.03 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

4.04 Penelitian dan pengembangan

B. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan Program yang ditetapkan hasil penyesuaian RPJMD adalah Perangkat Daerah baru yang ditetapkan untuk melaksanakan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka. Khusus untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, tetap melaksanakan program semula sambil menunggu regulasi lebih lanjut yang mengatur tentang Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun Perangkat Daerah yang dibentuk menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 dimaksud, sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
20. Dinas Ketahanan Pangan;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Pertanian;
23. Dinas Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
24. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Pendapatan Daerah;
27. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM;
28. Kecamatan Alok;
29. Kecamatan Alok Barat;
30. Kelurahan Alok Timur;
31. Kecamatan Bola;
32. Kecamatan Doreng;
33. Kecamatan Hewokloang;
34. Kecamatan Kangae;
35. Kecamatan Kewapante;
36. Kecamatan Koting;
37. Kecamatan Lela;
38. Kecamatan Magepanda;
39. Kecamatan Mapitara;
40. Kecamatan Mego;
41. Kecamatan Nelle;
42. Kecamatan Nita;
43. Kecamatan Paga;
44. Kecamatan Palue;
45. Kecamatan Talibura;
46. Kecamatan Tana Wawo;
47. Kecamatan Waiblama; dan
48. Kecamatan Waigete.

C. Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Misi 1 : Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang berkeadilan, tentram dan tertib

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (<i>outcome</i>)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawa
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir (Tahun 2018)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum	Pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berazaskan pemerataan, keadilan dan partisipatif	1 Penyusunan perencanaan yang berbasis karakteristik kewilayahan	1 Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	50	100	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan	Sat. Pol PP
			2 Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan melalui pelaksanaan	1 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	16,66	100	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Dinas LH
2.	Terwujudnya perikehidupan sosial yang harmonis		3 Peningkatan kerjasama pembangunan dibidang kemasyarakatan dengan lembaga agama dan sosial	1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	44,44	60	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	Dinas Sosial
				2 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit	100	100	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Dinas PP, KB dan PP&PA
				3 Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	100	100	Program Penanggulangan Darurat Bencana	BPBD, Dinas Sosial
3.	Terwujudnya kesetaraan gender		1 Peningkatan peran serta perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan	1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	25%	30%	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Dinas PP, KB dan PP&PA
				2 Cakupan keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan	32.963	23.498	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Dinas PP, KB dan PP&PA
Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah								
1.	Menurunnya angka kemiskinan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Pemberdayaan masyarakat desa	1. Peningkatan sarana produksi Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	1 Penurunan Angka kemiskinan (%)	12.83	10	Program-program pada urusan yang mendukung	Bappelitbang
				2 Peningkatan Keluarga Pra Sejahtera menjadi Keluarga Sejahtera I (KK)	32.963	23.498	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	
				3 Penanganan Daerah Rawan Pangan	100	100	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Pangan
2	Meningkatnya produksi sektor-sektor dan laju pertumbuhan ekonomi.		1 Peningkatan sarana produksi Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	1 Produksi Padi (ton)	25.104	38.897	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	
				2 Produksi Palawija (ton)	104.261	109.476		
				3 Produksi Sayur-sayuran	270.925	298.020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja di sektor Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	4 Produksi Sektor Perkebunan (ton)	21.692	23.850		
				5 Produksi perikanan (ton)	11.946	14.345	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran	
				6 Konsumsi ikan (Kg/kapita.tahun)	30,63	39,37		
				7 Produksi ternak (%)	20	20	Program peningkatan produksi hasil peternakan	
3.	Meningkatnya pendapatan perkapita			1 Meningkatnya PDRB Perkapita (Rp)	6.694.324	8.748.231	Program-program pada urusan yang mendukung	
				2 Meningkatnya daya beli masyarakat	602.536	641.701		
4.	Meningkatnya elastisitas kesempatan kerja		12. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja di sektor Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata	1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	70.77	80.50	Program peningkatan kesempatan kerja	Dinas Sosnakertrans
			13. Peningkatan kemampuan teknologi industri	2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	8,67	32,67	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja	
Misi 3: Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat								
1.	Meningkatnya akses dan pemerataan Pendidikan	Peningkatan pelayanan pendidikan dan penanggulangan masalah kesehatan bagi masyarakat	1 Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar	1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	98,93	99,00	Program pendidikan anak usia dini	Dinas PKO
				2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	91,70	91,95	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
				3 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	1,41	1,00	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	
				4 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,21	0,76	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
			2 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5 Rasio guru tetap/murid	1 : 35	1 : 32	Peningkaan mutu pendidikan	
				6 Rasio ruang kelas/rombongan belajar	1.10 : 1	1.00 : 1		Dinas PKO
				7 Rasio ruang kelas/rombongan belajar	1.00 : 1	1.00 : 1		
3.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat		1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di	1 Umur harapan hidup (th)	69,32	70	Program-program pada urusan yang mendukung	Dinas Kesehatan
				2 angka kesakitan (%)	42,51	38,21	Program upaya kesehatan	
				3 angka kematian ibu (per100.000 KH)	97	80	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan	
				4 angka kematian bayi (per 1000 bayi)	11	7		
			2 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit	5 Prevalensi HIV/AIDS (%)	0,60	0,35	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
			3 Revitalisasi sistem kesehatan dan pendidikan	6 Annual Paracite Insidence (per 1000 jiwa)	39	12		
			4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	7 Cure rate (%)	80	90		
				8 Persentase Desa UCI (%)	83	90	Program kemitraan peningkatan pelayanan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9 Jumlah desa stop BABS	76	120	kesehatan	
				10 Jumlah desa STBM	10	90		
				11 prevalensi gizi kurang	22,8	13		
				12 prevalensi gizi buruk (%)	0,8	0,4		
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih								
1.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Jumlah kasus penyalagunaan keuangan berdasarkan hasil temuan aparat pengawas	-	0	Program peningkatan sistim pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Bagian Pemerintahan Umum
			2. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis	2 Opini BPK (WTP)	WDP	WTP	Program peningkatan pengembangan sistim capaian	BPK dan Aset, BPD
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat			3 Integritas pelayanan publik	-	8,0	Program pelayanan administrasi kependudukan	Dispenduk capil,
							Program peningkatan kapasitas sumber daya	BKD
				4 Peringkat kemudahan berusaha (%)	-	75	Program peningkatan pelayanan perijinan	Dinas PM & SATAP
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja birokrasi			5 Indeks efektifitas pemerintahan	-	0,5	Program pemantapan otonomi daerah	Bagian Pemerintahan Umum
				6 Instansi pemerintah yang akuntabel (%)	-	80		BPK dan Aset, BPD

Tabel 2.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Belanja Langsung														1.231.141.060.265		
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
			Program SKPD																
0	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya layanan administrasi perkantoran yg memadai (%)	70	74	23.009.535.706	78	24.160.012.491	82	25.368.013.116	86	26.636.413.772	90	27.968.234.460	90	127.142.209.545	Semua PD	
0	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yg memadai (%)	75	77	16.746.456.559	80	17.583.779.387	83	18.462.968.356	86	19.386.116.774	90	20.355.422.613	90	92.534.743.689	Semua PD	
1	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya disiplin kerja aparatur di setiap SKPD (%)	60	66	5	72	78			84		90		90	5	Semua PD	
1	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (%)	60	66	5.591.894.300	72	5.871.489.015	78	6.165.063.466	84	6.473.316.639	90	6.796.982.471	90	30.898.745.891	Semua PD	
1	00	06	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan SKPD yg melaksanakan sistim pelaporan dan evaluasi kinerja (%)	100	100	97.151.800	100	102.009.390	100	107.109.860	100	112.465.352	100	118.088.620	100	536.825.022	Semua PD	
				Nilai SAKIP	C	C		C		CC		B		B		B			
1	01		Pendidikan																
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD (%)	47,12	47,28	1.279.340.000	47,45	1.279.340.000	47,61	1.378.000.000	47,78	48.748.817.150	47,95	1.678.000.000	47,95	54.363.497.150	Dinas PKO	
				Jumlah pelayanan PAUD yang dilaksanakan secara holistik dan integratif (%)	10	15		36		57		78		99		99			
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A (%)	114,3	114,63	29.500.000.000	114,95	31.800.000.000	115,28	35.000.000.000	115,6	41.472.310.050	115,92	38.000.000.000	119,92	175.772.310.050		
				Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B (%)	85,96	86,12		86,91		87,06		87,22		87,38		87,38			
				Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A (%)	94,33	94,58		94,83		95,08		95,33		95,58		95,58			
				Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B (%)	75,32	75,82		76,32		76,82		77,32		77,82		77,82			
				Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	1,41	1,33		1,23		1,14		1,09		1,00		1,00			
				Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	1,21	1,12		1,03		0,93		0,085		0,76		0,76			

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Prosentase kelulusan SD/MI (%)	99,3	99,55		99,8		100		100		100		100		
				Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	97,79	98,04		98,29		98,54		98,79		99,4		99,4		
1	01	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek huruf (%)	92,23	92,79	350.000.000	93,07	350.000.000	93,35	350.000.000	93,63	945.240.000	93,91	945.240.000		2.940.480.000	
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Kelayakan Mengajar Guru (%)	60	65	723.161.000	70	723.161.000	75	808.161.000	85	632.706.100	90	632.706.100	90	3.519.895.200	
				SD/MI (%)	14,70	26,72		32,73		38,74		44,75		50,76		51		
				SMP/MTs (%)	56,71	57,89		58,48		59,07		59,66		60,25		60,25		
				Jumlah Guru memiliki sertifikat Proefesi (%)	1190	1490		1790		2090		2390		2690		2690		
1	01	21	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan				240.900.000		252.945.000		265.592.250		125.000.000		131.250.000		1.015.687.250	
				SD/MI (%)	63,64	63,64		68,18		71,21		74,24		77,27			-	
				SMP/MTs (%)	60,00	66,67		73,33		80,00		86,67		93,33		93,33		
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Sekolah memiliki Dokumen KTSP			56.450.000		59.272.500		62.236.125		764.132.000		802.338.600		1.744.429.225	
				SD/MI (%)	12,12	27,27		42,42		57,58		72,73		87,88				
				SMP/MTs (%)	46,67	60,00		73,33		86,67		100,00		100,00				
				Rasio guru tetap/murid	1 : 35	1 : 35		1 : 34		1 : 34		1 : 33		1 : 32		1 : 32		
				Jumlah Dokumen Informasi Pelayanan Standar Nasional yang ter Up Date setiap Tahun Pelajaran	50	100		100		100		100		100		100		
1	02		Kesehatan															
1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat Esensial dan Generik (%)	100	100	2.235.000.000	100	2.285.000.000	100	3.285.000.000	100	73.262.766.230	100	73.287.766.230	100	154.355.532.460	Dinas Kesehatan
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	187,42	100	11.000.000.000	100	11.150.000.000	100	11.200.000.000	100	20.048.634.630	100	20.298.634.630	100	73.697.269.260	
				Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
1	02	17	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Penulisan Resep Obat Generik (%)	100	100	258.000.000	100	283.000.000	100	308.000.000	100	60.804.550	100	85.804.550	100	995.609.100	
1	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	850.000.000	100	875.000.000	100	912.500.000	100	132.675.000	100	132.675.000	100	2.902.850.000	
				Cakupan peserta KB Aktif (%)	66,97	70		72		74		76		78		78	-	Dinas PP & KB, PP & PA
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	80,64	84	325.000.000	86	375.000.000	88	413.000.000	90	218.850.500	92	368.850.500	92	1.700.701.000	Dinas Kesehatan
				Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Cakupan Balita yang Naik Berat Badannya (N/D) (%)	55,95	65		67		69		71		73		73	-	
				Cakupan Balita Bawah garis Merah (%)	2,54	2,40		1,60		1,60		1		0,50		0,50	-	
				Cakupan Kecamatan Bebas Rawan Gizi (%)	0	28		52		61		80		100		100	-	
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				85.000.000		85.000.000		85.000.000		53.732.000		53.732.000		362.464.000	
				Sarana Air Bersih yang memenuhi syarat kesehatan (%)	34,61	39		44		49		54		60		60	-	
				Cakupan Rumah Sehat (%)	24,72	57		62		65		70		75		75	-	
				Cakupan Jamban Keluarga (%)	15,71	65		70		75		85		90		90	-	
1	02	22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cure rate (%)	80	82	1.500.000.000	84	1.500.000.000	86	1.500.000.000	88	1.141.253.500	90	1.141.253.500	90	6.782.507.000	Dinas Kesehatan
				Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun (%)	0,94	>1		>1		>1		>1		>1		>1	-	
				Penemuan Penderita Pneumonia Balita (%)	18,95	22		24		26		28		30		30	-	
				Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif (%)	50	60		70		75		80		85		85	-	
				Kesembuhan Penderita TB BTA + (%)	76,57	90		92		94		96		100		100	-	
				Penderita DBD yang Ditangani (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
				Penemuan Penderita Diare (%)	34,39%	38%		40%		42%		44%		46%		46%	-	
				Klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
				Infeksi Menular seksual yang diobati (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
				Cakupan penderita Malaria yang diobati (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
				Cakupan Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT Rate > 90%) (%)	69,57	85		90		94		97		100		100	-	
				Cakupan Kasus Filariasis yang ditangani (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
				Cakupan Kasus frambusia yang ditangani (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	Dinas Kesehatan
				Persentase Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	83,13	91		95		99		100		100		100	-	
1	02	23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Cakupan lembaga-lembaga kesehatan yang telah memenuhi standar kesehatan (%)	75	80	82.000.000	85	87.000.000	90	92.000.000	95	95.283.000	100	95.283.000	100	451.566.000	Dinas Kesehatan
1	02	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan persalinan difasilitas kesehatan yang memadai (%)	86	77	7.500.000.000	80	8.000.000.000	82	9.100.000.000	84	7.905.996.161	86	7.905.996.161	86	40.411.992.322	
1	02	28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	0,66	2	15.000.000.000	2,5	15.500.000.000	3	16.000.000.000	3,5	34.710.815.600	4	34.710.815.600	4	115.921.631.200	
1	02	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan anak balita (%)	79,50	84	854.000.000	43	929.000.000	53	929.000.000	63	19.244.500	73	19.244.500	73	2.750.489.000	
				Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	99,77	90		100		100		100		100		100		
1	02	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan Usia Lanjut (%)	70	20		25	150.000.000	30	150.000.000	35	24.997.000	45	24.997.000	45	349.994.000	
1	02	32	Program Peningkatan Pelayanan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kunjungan ibu Hamil (K4) %	83	92	450.000.000	95	450.000.000	97	450.000.000	99	4.018.280.000	100	4.018.280.000	100	9.386.560.000	
				Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani (%)	100	93		94		95		96		97		97		
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi (%)	95,93	98		98		99		99		100		100		
				Cakupan Bayi Berat lahir rendah (BBLR) (%)	8,81	6,81		5		4		3		2		2		Dinas Kesehatan
				Cakupan Bayi yang Mendapat ASI Eksklusif (%)	80,69	85		88		91		95		96		96		

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03		Pekerjaan Umum															
1	03	15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, panjang jalan lingkungan, panjang pembukaan jalan (km)	518,03 km, 90,86 km 2 km	15 km, 10 km, 0,2 km	15.400.000.000	15 km, 10 km, 0,5 km	16.170.000.000	15 km, 10 km, 0,5 km	16.978.500.000	15 km, 10 km, 0,5 km	80.948.839.500	15 km, 10 km, 0,5 km	18.718.796.250	593,03 km, 140,86 km, 4,5 km	148.216.135.750	Dinas PUTR, DPKPP
				Jumlah jembatan yang terbangun	55 buah	1	1.000.000.000	1	1.150.000.000	1	1.322.500.000	1		1	1.749.006.250	60 buah	5.221.506.250	
1	03	16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase dan saluran yang terbangun (km)	4,202 km	1 km	400.000.000	1 km	420.000.000	1 km	441.000.000	1 km	850.020.100	1 km	486.202.500	9,202 km	2.597.222.600	Dinas PUTR, DPKPP
1	03	17	Program pembangunan turap/talud/ bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun (km)	2,156 km	3	960.000.000	3	1.008.000.000	3	1.058.400.000	3	4.818.900.000	3	1.166.886.000	11,156 km	9.012.186.000	
1	03	18	Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten yang terpelihara dengan kondisi baik (km)	523,13	14 km, 0,36 km	2.568.307.470	14 km, 0,36 km	2.696.722.844	14 km, 0,36 km	2.831.558.986	14 km, 0,36 km	8.826.010.500	14 km, 0,36 km	9.267.311.025	593,13 km	26.189.910.824	
1	03	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	2 unit truk, 3 unit alat berat	2 unit truk, 3 unit alat berat	235.200.000	2 unit truk, 3 unit alat berat	246.960.000	2 unit truk, 3 unit alat berat	259.308.000	2 unit truk, 3 unit alat berat	409.214.000	2 unit truk, 3 unit alat berat	285.887.070		1.436.569.070	
1	03	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	Jumlah Daerah Irigasi yang terpelihara	5 D.I	5 D.I	232.775.000	5 D.I	244.413.750	5 D.I	256.634.438	5 D.I	15.424.111.633	5 D.I	282.939.467		16.440.874.288	
				Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik (ha)	3985,26	100	108.000.000	100	113.400.000	100	119.070.000	100		100	131.274.676		471.744.676	
1	03	25	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Jumlah luas tanam (ha)	4596	100	486.514.875	100	510.840.619	100	536.382.650	100	15.010.800.000	100	591.361.871	5096	17.135.900.015	
1	03	27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan pelayanan air minum (%)	46,04	50	500.000.000	55	525.000.000	60	551.250.000	65	4.384.378.500	70	607.753.125	70	6.568.381.625	
				Cakupan pelayanan air limbah (%)	46,60	0,32	101.500.000	0,32	106.575.000	0,32	111.903.750	0,32		0,32	123.373.884		443.352.634	
1	03	31	Program perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen RUTRK-RDTRK tiap kecamatan	5	3	125.000.000	8	135.000.000	12	135.000.000	15	277.234.350	18	291.096.068	21	963.330.418	Dinas PUTR
1	03	33	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan	150	150	60.000.000		60.000.000		60.000.000		207.882.600		218.276.730		606.159.330	
1	04		Perumahan															
1	04	15	Program pengembangan perumahan	Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (rumah)	315	105	120.000.000	105	132.000.000	105	145.200.000	105	5.367.791.650	105	175.692.000	525	5.940.683.650	Dinas PM & Desa, Dinas Sosial, Bapelitbang
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan pelayanan sanitasi dasar penduduk miskin (%)	15,02	1,9	982.687.000	1,9	1.031.821.350	1,9	1.083.412.418	1,9	1.156.982.000	1,9	1.194.462.190	9,5	5.449.364.958	DPKPP
1	05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
1	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kasus yang terjadi		35 kasus	618.446.400	30 kasus	649.368.720	25 kasus	681.837.156	20 kasus	1.531.800.000	15 kasus	1.608.390.000	15 kasus	5.089.842.276	Dinas Satuan Pol PP
				Terpeliharanya kantrantibmas dan tercegahnya tindakan kriminal (%)	50	55		60		65		70		70			-	
				Jumlah kasus yang terjadi		35 kasus	618.446.400	30 kasus	649.368.720	25 kasus	681.837.156	20 kasus	1.531.800.000	15 kasus	1.608.390.000	15 kasus	5.089.842.276	Dinas Satuan Pol PP

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	05	16	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal	Cakupan penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah (%)	10	10	394.000.000	10	413.700.000	10	434.385.000	10	470.200.000	10	493.710.000	50	2.205.995.000	Dinas Satuan Pol PP
				Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (%)	50	55		60		65		70		75		75	-	
				Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas)	2512 orang	3504 orang		2512 orang		2512 orang		2512 orang		2512 orang		2512 orang	-	
1	05	26	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		0	0	130.000.000	0	136.500.000	0	143.325.000	0	60.000.000	0	63.000.000	0	532.825.000	Dinas Satuan Pol PP
1	05	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik antar umat beragama dan demokrasi masyarakat	0	0	130.000.000	0	136.500.000	0	143.325.000	0	234.800.000	0	246.540.000	0	891.165.000	Badan Kesbangpol
		18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik antar umat beragama dan demokrasi masyarakat	0	0	85.000.000	0	89.250.000	0	93.712.500	0	35.000.000	0	36.750.000	0	339.712.500	Badan Kesbangpol
1	05	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	cakupan desa yang memiliki organisasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban (%)	75	80		85	100.000.000	90	105.000.000	95		100	-	100	205.000.000	Badan Kesbangpol
1	05	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Cakupan wilayah pembinaan dan pemberantasan PEKAT (%)	60	65	287.000.000	70	301.350.000	75	316.417.500	80	100.000.000	85	105.000.000	85	1.109.767.500	Badan Kesbangpol
1	05	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan pembinaan politik daerah (%)	90	100	284.990.000	100	299.239.500	100	314.201.475	100	165.000.000	100	173.250.000	100	1.236.680.975	Badan Kesbangpol
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik (%)	90	95		-		-		-		95			-	
1	05	20	Program peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Cakupan wilayah pembinaan dan pemberantasan PEKAT (%)	60	65	287.000.000	70	301.350.000	75	316.417.500	80	40.000.000	85	42.000.000	85	986.767.500	Badan Kesbangpol , Dinas Sat Pol PP
1	05	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan bencana dan penanggulangan korban bencana alam (%)	23	24	180.000.000	43	521.500.011	62	610.825.013	81	255.812.500	100		100	1.568.137.524	BPBD
				Dokumen daerah rawan bencana	1	1		1		1		1		1		1	-	
				Persentase penanganan korban bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
1	05	23	Program Penanggulangan Darurat Bencana	Tersedianya Fasilitas Penanggulangan Bencana (%)	50	60	185.000.000	70	194.250.000	80	203.962.500	90	64.308.000	100	67.523.400	100	715.043.900	BPBD
1	05	24	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersedianya Penanganan Pasca Bencana (%)	13	30	275.000.000	44	330.000.000	61	350.000.000	78	50.000.000	96	350.000.000	96	1.355.000.000	BPBD

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	06		Sosial															
1	06	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	44,44	44,44	250.000.000	46,7	250.000.000	56,2	300.000.000	62,4	340.000.000	68,5	350.000.000	68,5	1.490.000.000	Dinas Sosial
1	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	82,61	100	485.000.000	100	485.000.000	100	485.000.000	100	933.237.500	100	525.000.000	100	2.913.237.500	Dinas Sosial
				persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	82,61	100		100		100		100		100		100	-	Dinas Sosial
1	06	17	Program Pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang ditangani	8,33	33,33	150.000.000	50	150.000.000	66,67	175.000.000	83,33	162.334.600	100	200.000.000	100	837.334.600	Dinas Sosial
1	06	18	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	8,33	33,33	150.000.000	50	150.000.000	66,67	175.000.000	83,33	247.665.400	100	200.000.000	100	922.665.400	Dinas Sosial
1	06	19	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Jumlah panti yang difasilitasi	8,33	33,33	150.000.000	50	150.000.000	66,67	175.000.000	83,33	30.000.000	100	200.000.000	100	705.000.000	Dinas Sosial
1	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	14,28	42,85	35.000.000	57,13	40.000.000	71,42	75.000.000	85,70	323.487.500	99,98	100.000.000	99,98	573.487.500	Dinas Sosial
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
2	01		Tenaga Kerja															
2	01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (%)	8,67	16,67	175.000.000	20,67	1.675.000.000	24,67	200.000.000	28,67	167.400.000	32,67	250.000.000	32,67	2.467.400.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (%)	14,71	32,35		41%		50		58,82		67,65		67,65	-	
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan (%)	0,40	5,20		8		10,40		12,8		15,2		15,2	-	

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	14,23	18	494.175.000	20	525.000.000	25	525.000.000	30	328.007.000	35	328.007.000	35	2.200.189.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (%)	100	100	119.000.000	100	119.000.000	100	124.000.000	100	125.877.200	100	135.000.000	100	622.877.200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK (%)	14,23	20%		28%		30%		38%		48%		48%	-	
				Besaran pemeriksaan perusahaan (%)	40,65	60,98		71,14		81,30		91,46		100				
				Besaran pengujian peralatan di perusahaan (%)	20,33	40,65		50,81		60,98		71,14		81,30			-	
2	02		Pemberdayaan Perempuan dan	Perlindungan Anak														
2	02	16	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Cakupan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang didampingi (%)	24	33	275.000.000	43	285.000.000	52	295.000.000	62	582.464.500	71	334.264.000	71	1.771.728.500	
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	27	30		33		36		39		42		42	-	
2	02	17	Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan peran perempuan dan kesetaraan gender dalam jabatan politik dan publik(%)	6,67	13 dan 30	10.000.000	13 dan 30	15.000.000	13 dan 30	25.000.000	13 dan 30	46.000.000	13 dan 30	46.000.000	13 dan 30		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
2	02	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan peran perempuan dan kesetaraan gender dalam jabatan politik dan publik(%)	6,67	13 dan 30	10.000.000	13 dan 30	15.000.000	13 dan 30	25.000.000	13 dan 30	155.000.000	13 dan 30	155.000.000	13 dan 30		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
2	03		Pangan															
2	03	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	208,52	100	1.179.395.500	100	1.238.365.275	100	1.300.283.539	100	1.253.159.107	100	1.315.817.062		6.287.020.483	Dinas Ketahanan Pangan
				Penguatan cadangan pangan	-18,01	30		55		80		105		130			-	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	85,10	86		87		88		89		90			-	
				Penanganan daerah rawan pangan (%)	42,86	48		54		60		66		72			-	
2	03	16	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan	Jumlah penyuluh pertanian (%)	208,52	100	1.179.395.500	100	1.238.365.275	100	1.300.283.539	100	1.651.445.000	100	1.734.017.250		7.103.506.564	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	19	Program Pemberdayaan kelembagaan petani dan Usaha Tani	Jumlah lembaga tani yang diberdayakan	208,52	100	1.179.395.500	100	1.238.365.275	100	1.300.283.539	100	285.952.300	100	300.249.915		4.304.246.529	Dinas Ketahanan Pangan
2	04		Pertanahan															

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	04	16	Program penataan, Penguasaan, Pemilikan, penggunaa dan Pemanfaatan Tanah		5	3	125.000.000	8	135.000.000	12	135.000.000	15	3.050.377.000	18	3.202.895.850	21	6.648.272.850	DPKPP
2	04	17	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanian		5	3	125.000.000	8	135.000.000	12	135.000.000	15	120.000.000	18	126.000.000	21	641.000.000	DPKPP
2	04	18	Program Pengembangan Sistim informasi pertanian		5	3	125.000.000	8	135.000.000	12	135.000.000	15	75.000.000	18	78.750.000	21	548.750.000	DPKPP
2	05		Lingkungan hidup															
2	05	15	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	cakupan areal perkotaan yang terlayani jaringan persampahan dan prosentase jumlah sampah yang terangkut di TPA	8 kelurahan, 52 %	8 kelurahan, 51%	1.265.300.000	8 kelurahan , 49%	1.328.565.000	8 kelurahan, 47%	1.394.993.250	8 kelurahan, 45%	2.631.996.200	62.640 ton	1.537.980.058		8.158.834.508	Dinas LH
2	05	16	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi standar baku mutu lingkungan (%)	45	55	25.000.000	65	25.000.000	75	25.000.000	85	411.293.049	95	411.293.049	95	897.586.098	Dinas LH
				Prosentase tindak lanjut pengaduan kasus lingkungan (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
2	05	17	Program perlindungan dan konservasi Sumberdaya alam	prosentase luas lahan kritis (%)	34	32	550.000.000	30	350.000.000	28	350.000.000	26	1.270.935.504	24	1.270.935.504	24	3.791.871.008	Dinas LH
2	05	19	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Jumlah data atau informasi lingkungan yang tersedia	1 dok	1 dok	25.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	350.000.000	1 dok	240.920.500	1 dok	240.920.500	1 dok	886.841.000	Dinas LH
2	05	24	Program Pengelolaan RTH	Jumlah RTH yang terpelihara	5 lokasi	7 lokasi	204.397.874	7 lokasi	214.617.768	7 lokasi	225.348.656	7 lokasi	825.300.000	7 lokasi	248.446.893		1.718.111.191	Dinas LH
2	05	25	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah areal tempat pemakaman umum yang dikelola	5 lokasi	5 lokasi	37.100.000	5 lokasi	38.955.000	6 lokasi	40.902.750	6 lokasi	417.346.275	6 lokasi	45.095.282	6	579.399.307	Dinas LH
2	06		Kependudukan dan Catatan Sipil															
2	06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	51	51	900.000.000	63	950.000.000	75	950.000.000	87	2.514.611.120	100	1.200.000.000	100	6.514.611.120	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (%)	63	63		73		83		93		100		100	-	
				Cakupan penduduk yang memiliki kutipan akta kelahiran (%)	53	53		63		73		83		100		100	-	
				Cakupan penduduk meninggal yang memiliki kutipan akta kematian (%)	53	53		63		73		83		100		100	-	
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang diberdayakan	6 lembaga	10 lembaga	46.472.000.000	12 lembaga	46.472.000.000	13 lembaga	46.472.000.000	14 lembaga	495.250.000	15 lembaga	495.250.000	15 lembaga	140.406.500.000	DPM & D
				Jumlah tenaga teknis dan masyarakat yang diberdayakan	85 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		100 orang	-	DPM & D
2	07	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah kelompok penerima dana pemberdayaan	117 klp	4 klpk	350.000.000	4 klpk	350.000.000	4 klpk	350.000.000	4 klpk	101.000.000	5 klpk	101.000.000	21 klp	1.252.000.000	DPM & D
2	07	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Partisipasi masyarakat dalam membangun desa (%)	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	3.072.500.000	100	3.072.500.000	100	10.645.000.000	DPM & D
2	07	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan LPPD, LKPJ dan ADD tepat waktu (%)	65	75	520.000.000	85	520.000.000	90	520.000.000	95	112.500.000	100	520.000.000	100	2.192.500.000	DPM & D
2	07		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat Kapasitas aparatur desa dalam bidang manajemen desa	60	65	220.000.000	70	231.000.000	75	242.550.000	80	263.572.900	90	276.751.545	90	1.233.874.445	DPM & D
				Tingkat Kapasitas aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	60	65	300.000.000	70	315.000.000	75	330.750.000	80	347.287.500	90	364.651.875	90	1.657.689.375	
2	08		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera															
2	08	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%)	8,00	7%	70.000.000	6%	73.000.000	5%	76.000.000	4%	862.768.000	3%	85.000.000	3%	1.166.768.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
				Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)													-	
2	08	16	Program kesehatan reproduksi Remaja	Cakupan sekolah yang mendapatkan penyuluhan tentang reproduksi (%)	10%	20%	100.000.000	40%	105.000.000	60%	110.000.000	80%	137.178.000	100%	120.000.000		572.178.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
2	08	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan pelayanan kontrasepsi (%)	40	45	70.000.000	50	73.500.000	55	77.175.000	60	751.143.000	65	119.557.150	65	1.091.375.150	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
2	08	18	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	jumlah kelompok masyarakat yang peduli terhadap program KB/KR			450.000.000		475.000.000		500.000.000		354.445.724		550.000.000		2.329.445.724	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
2	08	22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	dokumen informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1	1	109.800.000	1	112.000.000	1	116.000.000	1	82.500.000	1	150.000.000	1	570.300.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
2	08	23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	persentase PUS keluarga pra seahtera dan sejahtera 1 anggota UPPKS yang menjadi peserta KB (%)	55	60	60.000.000	65	65.000.000	70	70.000.000	75	244.186.500	80	100.000.000	80	539.186.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	08	25	Program pembinaan kelompok ketahanan dan pemberdayaan keluarga		55	60	60.000.000	65	65.000.000	70	70.000.000	75	20.000.000	80	100.000.000	80	315.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
2	09		Perhubungan															
2	09	15	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya prasarana dan fasilitas LLAJ di kota maupun di kecamatan (%)	40	52	184.000.000	64	184.000.000	76	184.000.000	88	2.585.000.000	100	250.000.000	100	3.387.000.000	Dinas Perhubungan
2	09	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik (%)	60	65	150.000.000	70	150.000.000	75	150.000.000	80	27.375.000	85	27.375.000	85	504.750.000	Dinas Perhubungan
2	09	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya angkutan Umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan baik angkutan kota maupun angkutan desa (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	880.196.360	100	880.196.360	100	2.060.392.720	
				Tersedianya Angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal atau daerah perbatasan dengan kota maumere (%)	70	100		100		100		100		100		100	-	
2	09	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang tipe B (%)	30	40	50.000.000	50	1.500.000.000	60	50.000.000	80	5.085.919.000	100	5.085.919.000	100	11.771.838.000	
2	09	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan pagar pengaman) dan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten (%)	20	36	30.000.000	52	30.000.000	68	30.000.000	84	1.159.908.000	100	50.000.000	100	1.299.908.000	
2	09	20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor (%)	80	100	25.000.000	100	50.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	185.000.000	
2	09			Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor (%)	75	100		100		100		100		100		100	-	
2	10		Komunikasi dan Informatika															
2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Meningkatnya kualitas Komunikasi dan Informasi	40 orang	40 orang	75.000.000	40 orang	82.500.000	40 orang	90.750.000	40 orang	348.088.280	40 orang	382.897.108	200 orang	979.235.388	Dinas KomInfo
2	10	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah dapat diakses melalui website, melalui Radio (%)	45	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	301.900.000	100	301.900.000	100	1.053.800.000	Dinas KomInfo

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	10	18	Program Pengembangan data dan Informasi		45	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	600.000.000	Dinas KomInfo
2	11		Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah															
2	11	15	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi yang berbadan hukum	135	145	18.000.000	155	23.400.000	165	28.600.000	175	378.652.910	185	40.000.000		488.652.910	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2	11	16	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah kelompok masyarakat yang terlatih dalam bidang kewirausahaan UMKM	12	4	75.000.000	4	95.000.000	4	100.000.000	4	142.379.000	4 klp	110.000.000		522.379.000	
2	11	17	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Kecil Menengah	Jumlah koperasi/UKM penerima dana bergulir yang mengangsur tepat waktu	197	280	110.000.000	340	110.000.000	360	115.000.000	390	164.418.000	410	135.000.000		634.418.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2	11	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi /UKM yang difasilitasi untuk mengakses kredit perbankan	215 org	110 UKM	40.000.000	115 UKM	40.000.000	120 UKM	50.000.000	125 UKM	191.053.000	130 UKM	60.000.000	135 UKM	381.053.000	
				Jumlah koperasi aktif	101	107	85.000.000	120	95.000.000	134	100.000.000	148		162	110.000.000		390.000.000	
				Jumlah koperasi sehat	85	95	85.000.000	110	90.000.000	124	95.000.000	138		152	105.000.000		375.000.000	
2	12		Penanaman Modal															
2	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah perusahaan modal asing	6	6	40.000.000	6	42.000.000	7	44.100.000	7	285.460.000	8	299.733.000	8	711.293.000	Dinas PM dan Pelayanan Terpadu
				Jumlah perusahaan dalam negeri	54	56		58		60		62		64		64	-	
2	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi	3		40.000.000	3	42.000.000	4	44.100.000	5	440.000.000	5	462.000.000	3	1.028.100.000	Dinas PM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	42	Program Pelayanan Perijinan Terpadu	Jumlah ijin yang dikeluarkan	21	22	98.000.000	23	102.900.000	24	108.045.000	25	525.000.000	26	551.250.000	26	1.385.195.000	Dinas PM dan Pelayanan Terpadu
				Lamanya waktu pengurusan ijin (hari)	14	14		12		10		8		6		6	-	
2	13		Pemuda Dan Olahraga															
2	13	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	cakupan peran serta Olaraga Pemuda (%)			1.250.000.000		1.437.500.000		1.250.000.000		864.582.500		907.811.625		5.709.894.125	Dinas PKO
2	13	17	Program Peningkatan upaya Penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda										125.000.000		131.250.000		256.250.000	Dinas PKO
2	13	19	Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen Olah raga										75.000.000		78.750.000		153.750.000	Dinas PKO
2	13	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olah Raga										75.000.000		78.750.000		153.750.000	Dinas PKO
2	13	21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)			25.000.000		26.250.000		27.562.500		324.838.000		341.079.900		744.730.400	Dinas PKO, Kecamatan dan Kelurahan
2	16		Kebudayaan															
2	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	25 situs	25 situs	98.680.000	27 situs	103.614.000	28 situs	108.794.700	29 situs	439.025.000	30 situs	460.976.250		1.211.089.950	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah potensi seni budaya yang dikembangkan	3 jenis seni budaya	4 jenis seni budaya	416.570.000	6 jenis seni budaya	437.398.500	6 jenis seni budaya	459.268.425	6 jenis seni budaya	257.800.000	6 jenis seni budaya	270.690.000	6 jenis seni budaya	1.841.726.925	
2	17		Perpustakaan															
2	17	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya pelayanan perpustakaan keliling dan pelayanan perpustakaan sore hari	2 orang, 1 paket	2 orang, 1 paket	30.000.000	2 orang, 1 paket	30.000.000	2 orang, 1 paket	30.000.000	2 orang, 1 paket	35.000.000	2 orang, 1 paket	50.000.000		175.000.000	Badan Kearsipan dan Perpustakaan
2	18		Kearsipan															
2	18	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Sistim arsip daerah tertata dengan baik		7 SKPD,4 Kec, 32 Desa	75.000.000	7 SKPD,4 Kec, 32 Desa	75.000.000	7 SKPD,4 Kec, 32 Desa	80.000.000	7 SKPD,4 Kec, 32 Desa	286.822.595	7 SKPD,4 Kec, 32 Desa	301.163.725	43 SKPD,21 Kec, 140 Desa/Kel.	817.986.320	Badan Kearsipan dan Perpustakaan
2	18	17	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan (%)	100	100	25.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	37.500.000	100	39.375.000	100	171.875.000	
2	18	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tersedianya naskah sumber arsip daerah	-	7 SKPD,4 Kec, 32 Desa	50.000.000	7 SKPD,4 Kec, 32 Desa	50.000.000	7 SKPD,4 Kec, 32 Desa	50.000.000	7 SKPD,4 Kec, 32 Desa	125.000.000	7 SKPD,4 Kec, 32 Desa	131.250.000	43 SKPD,21 Kec, 140 Desa/Kel.	406.250.000	
3			Urusan Pilihan															
3	01		Kelautan dan Perikanan															
3	01	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.	bertambahnya jumlah wirausaha baru di bidang perikanan	300 org	16%	379.000.000	16%	364.000.000	16%	364.000.000	16%	118.465.950	16%	414.000.000	80%	1.639.465.950	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	prosentase usaha kelautan dan perikanan yang menerapkan pola kemitraan (%)	90	15	120.027.000	15	120.027.000	15	120.027.000	15	104.846.000	15	120.027.000	75	584.954.000	
3	01	18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci , akurat dan up to date (%)	30 klp	-	-	20	375.000.000	20	375.000.000	20	74.070.000	20	375.000.000	80	1.199.070.000	
3	01	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah benih dan bibit unggul yang dihasilkan pada balai benih ikan (%)	8 klp	12	199.800.000	12	199.800.000	12	199.800.000	12	71.598.200	12	71.598.200	60	542.796.400	
3	01	21	Program pengembangan perikanan tangkap	Prosentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan (%)	10 klp, 3 rumpon, 2 mesin, 2 kapal	15	7.353.120.000	15	7.353.120.000	15	7.353.120.000	15	9.607.664.500	15	9.607.664.500	75	41.274.689.000	
3	01	22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan tangkap	Prosentase desa perikanan yang memiliki kelompok usaha bersama (KUB) dan penyuluh yang produktif (%)	14 PNS Penyuluh	16	173.800.000	16	180.000.000	16	230.000.000	16	39.227.375	16	39.227.375	80	662.254.750	

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	01	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase kelompok usaha bersama yang produktif (%)	15 klp usaha	16	2.150.000.000	16	3.300.000.000	16	3.350.000.000	16	1.520.171.820	16	1.520.171.820	80	11.840.343.640	
3	01	24	Program pengembangan budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah wirausaha baru di bidang perikanan di setiap kecamatan	5 klp	15%	716.250.000	15%	716.250.000	10%	716.250.000	10%	400.783.500	10%	400.783.500	60%	2.950.317.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	25	Program peningkatan konservasi, rehabilitasisumberdaya kelautan dan perikanan	Terpeliharanya terumbu karang (luas tutupan terumbu karang) (%)	37	20	550.000.000	20	1.000.000.000	15	1.000.000.000	10	424.138.300	5	424.138.300	70	3.398.276.600	
3	02		Pariwisata															
3	02	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata (org)	16.448	30.000	2.629.505.950	30.500	2.760.981.248	31.000	2.899.030.310	31.500	863.540.000	32.000	906.717.000		10.059.774.507	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Rata-rata lama tinggal	4,5 hari	3 hari		3,2 hari		3,3 hari		3,5 hari		3,6 hari		3,6 hari	-	
				Belanja Wisatawan (Perhari) (dlm Juta)	1.175.000	1.175		1.250		1.300		1.400		1.750		1.750	-	
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,65%	0,68%		0,71%		0,73%		0,75%		0,78%		0,78%	-	
3	02	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.	Jumlah Obyek Pariwisata yang dikembangkan	5 obyek	6 obyek	450.000.000	8 obyek	450.000.000	10 obyek	550.000.000	11 obyek	3.271.807.000	13 obyek	3.271.807.000	13 obyek	7.993.614.000	
3	02	17	Program Pengembangan Kemitraan.	jumlah usaha pariwisata yang terbentuk	4	4	75.000.000	5	75.000.000	6	100.000.000	7	603.424.000	7	603.424.000	7	1.456.848.000	
3	03		Pertanian															
3	03	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	cakupan petani yang mendapat layanan (%)	18	22	1.137.500.000	440	679.692.000	22	1.137.500.000	22	289.397.500	22	1.137.500.000	110	4.381.589.500	Dinas Pertanian
				Jumlah kelompok tani yang menerapkan pola PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu)	240	10		5		10		10		10		50	-	
3	03	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah terjalinnya kontak bisnis	1	4	135.000.000	5	122.265.000	4	130.000.000	4	17.100.000	3	125.000.000	19	529.365.000	Dinas Pertanian
3	03	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /perkebunan	Jumlah kelompok tani yang mengadopsi inovasi teknologi pertanian/perkebunan	240	25	755.000.000	23	654.148.000	25	755.000.000	25	1.071.675.000	20	655.000.000	120	3.890.823.000	Dinas Pertanian
3	03	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan				8.243.428.750		23.671.352.895		8.293.428.750		17.408.584.378		8.223.428.750		65.840.223.523	Dinas Pertanian
				Jumlah produksi padi (ton)	25.104	27.614		22.001		33.136		35.897		38.897		38.897		
				Jumlah produksi palawija (ton)	104.261	105.304		98.193		107.390		108.433		109.476		109.476		
				Jumlah produksi sayur-sayuran (ton)	270.925	276.340		1.276		287.180		292.600		298.020		298.020		
				Jumlah produksi komoditas perkebunan (ton)	21.692	22.130		24.893		22.990		23.420		23.850		23.850	-	
				Luas areal tanaman padi dan palawija yang terintensifikasi (ha)	2.423	281,5		367		385		390		390		1826,53	-	

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Luas areal peremajaan tanaman perkebunan (ha)	235	200		375		200		175		150		925	-	
				luas areal intensifikasi tanaman perkebunan	380	200		1.527		200		200		150		950		
3	03	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Ternak	Persentase angka kesakitan hewan akibat penyakit hewan menular (rabies) (%)	5	4	665.000.000	2	698.250.000	1	733.162.500	0	928.100.000	0	974.505.000		3.999.017.500	Dinas Pertanian
				Persentase cakupan vaksinasi (%)	58	63		70		70		70		70		70	-	
				Persentase angka kematian ternak akibat penyakit menular strategis (%)	30	26		22		18		14		10		10	-	
				Persentase Puskesmas yang memiliki fasilitas (%)	0	20		20		20		20		20		100	-	
				Persentase aktivitas perdagangan ternak yang terawasi (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
3	03	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase kelompok tani ternak yang mendapat bantuan ternak pemerintah (%)		20	2.341.830.000	20	2.458.921.500	20	2.581.867.575	20	7.194.049.588	20	7.553.752.067	100	22.130.420.730	Dinas Pertanian
				Persentase potensi peternakan yang dikembangkan (%)		45		45		31,5		12		7		7	-	
				Jumlah kelompok tani ternak yang menerapkan prinsip agribisnis (%)	-	20		20		20		20		20		100	-	
3	03	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase aktifitas perdagangan ternak yang tidak sesuai ketentuan (%)		5	50.000.000	4	50.000.000	3	50.000.000	2	141.500.000	1	141.500.000	1	433.000.000	Dinas Pertanian
				Persentase keluhan atas tersedianya data informasi pasar (%)		5		4		3		2		1		1	-	
3	03	24	Program Peningkatan Produksi Peternakan		-	20		20		20		20	163.000.000	20		100	163.000.000	
3	06		Perdagangan															
3	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pengendalian dan pengujian terhadap barang dan jasa yang beredar sesuai ketentuan	22 kali	24 kali	120.000.000	28 kali	137.000.000	32 kali	167.000.000	36 kali	290.000.000	40 kali	158.000.000	160 kali	872.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	06	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah promosi dan pameran skala regional, nasional dan internasional	1 even	3 even	126.000.000	1 even	150.000.000	2 even	176.000.000	2 even	80.000.000	2 even	225.000.000	10 even	757.000.000	
3	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Sarana perdagangan dan arus distribusi barang/produk	-	21 lokasi	449.000.000	25 lokasi	449.000.000	23 lokasi	459.000.000	25 lokasi	2.227.617.058	25 lokasi	2.227.617.058	119 lokasi	5.812.234.116	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	06	19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Penataan pedagang kaki lima dan asongan			350.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		50.000.000		475.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	07		Perindustrian															
3	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	Kualitas pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kegiatan pelatihan, pembinaan dan pendampingan khususnya bidang perindustrian	-	34 klp, 50 pelaku usaha	260.000.000	34 klp, 50 pelaku usaha	275.000.000	30 klp, 50 pelaku usaha	230.000.000	31 klp, 50 pelaku usaha	4.200.000.000	33 klp, 50 pelaku usaha	4.200.000.000	162 klp, 250 pelaku usaha	9.165.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	07		Transmigrasi															
3	07	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Fasilitas wilayah transmigrasi			350.000.000		350.000.000		350.000.000		203.193.000		203.193.000		1.456.386.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	07	16	Program Transmigrasi Lokal	Keberdayaan para transmigran					75.000.000		75.000.000,00		100.877.000,00		100.877.000,00		351.754.000	
4			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															
4	01		Administrasi Pemerintahan															
4	01	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat Kapasitas aparaturnya desa dalam bidang manajemen desa	60	65	220.000.000	70	231.000.000	75	242.550.000	80	263.572.900	90	276.751.545	90	1.233.874.445	Dinas PM dan Desa
4	01	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PERDA dan PERBUP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru	7	4 Ranperda, 15 Perbup	200.000.000	4 Ranperda, 15 Perbup	200.000.000	4 Ranperda, 15 Perbup	200.000.000	4 Ranperda, 15 Perbup	710.879.000	4 Ranperda, 16 Perbup	710.879.000		2.021.758.000	Bagian Hukum
				Cakupan wilayah sadar hukum		10 desa		10 desa		10 desa		10 desa		10 desa		50 desa	-	
				Jumlah Peraturan Desa yang diasistensi		294 Perdes		294 Perdes		300 Perdes		300 Perdes		300 Perdes			-	
4	01	34	Program penanganan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		100								34.854.000	100	36.596.700	100	71.450.700	Bagian Hukum
4	01	30	Program peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian		100	100	2.885.280.000	100	3.029.544.000	100	3.181.021.200	100	147.400.000	100	154.770.000	100	9.398.015.200	Bagian Perekonomian
4	01	06	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Perangkat Daerah yg melaksanakan sistim pelaporan dan evaluasi kinerja (%)	100	100	97.151.800	100	102.009.390	100	107.109.860	100	112.465.352	100	118.088.620	100	536.825.022	Semua PD
				Nilai SAKIP	C	C		C		CC		B		B		B		
4	01	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase pelayanan informasi yang dipublikasikan (%)	80		612.480.000		643.104.000		675.259.200		822.443.950		863.566.148		3.616.853.298	Bagian Humas danProtokol
				Persentase bantuan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Cakupan pelayanan dan fasilitas keagamaan (%)	100	100	750.000.000	100	787.500.000	100	826.875.000	100	868.218.750	100	911.629.688	100	4.144.223.438	
				Pelaksanaan rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah	4 kali	4 kali	612.000.000	4 kali	642.600.000	4 kali	674.730.000	4 kali	708.466.500	4 kali	743.889.825	4 kali	3.381.686.325	Bagian Pemerintahan
				Pelaksanaan rapat kerja ketentraman dan ketertiban	1 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	-	
				Pelaksanaan rapat kerja pamong praja	3 kali	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali	-	
				Cakupan pelayanan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (%)	100	100	600.000.000	100	630.000.000	100	661.500.000	100	694.575.000	100	729.303.750	100	3.315.378.750	
				Jumlah dokumen perencanaan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan	16 buah	20 buah	600.000.000	30 buah	630.000.000	38 buah	661.500.000	38 buah	694.575.000	38 buah	729.303.750	38 buah	3.315.378.750	Bagian Organisasi
				Jumlah struktur organisasi yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai standar beban kerjanya	73 SKPD	73 SKPD		73 SKPD		73 SKPD		73 SKPD		73 SKPD		73 SKPD	-	
				Persentase SKPD yang tepat melaksanakan penyusunan RKT, PK dan LAKIP untuk mendukung kinerja (%)	75	80		90		100		100		100		100	-	Bagian Organisasi
				Persentase SKPD yang membuat laporan sesuai ketentuan (%)	80	90		100		100		100		100		100	-	
				Cakupan pengawasan SITU dan SIUP (%)	100	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	231.525.000	100	243.101.250	100	1.105.126.250	Bagian Perekonomian dan SDA
				Cakupan pengawasan bahan bakar minyak (%)	80	88		90		95		100		100		100	-	
				Jumlah desa keluarga miskin yang mendapatkan bantuan raskin	160 des/ke.	160 des/ke.		160 des/ke.		160 des/ke.		160 des/ke.		160 des/ke.		160 des/ke.	-	
				Dokumen Standar harga barang dan jasa	1 dok	1 dok	35.000.000	1 dok	36.750.000	1 dok	38.587.500	1 dok	40.516.875	1 dok	42.542.719	1 dok	193.397.094	
4	01	25	Program peningkatan Kerja sama antar Pemerintah Daerah		100	100	2.885.280.000	100	3.029.544.000	100	3.181.021.200	100	39.250.000	100	41.212.500	100	9.176.307.700	Badan Pendapatan Daerah
4	01	27	Program penataan Daerah Otonomi Baru		100	100	2.885.280.000	100		100		100	140.000.000	100	147.000.000	100	3.172.280.000	Badan Pendapatan Daerah

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	01	29	Peningkatan manajemen pengelolaan program/kegiatan pembangunan	Ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan (%)	75	80	425.000.000	85	446.250.000	90	468.562.500	90	513.667.850	95	539.351.243	95	2.392.831.593	Bagian Pembangunan
				Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Proc) (%)	3	50	425.000.000	100	446.250.000	100	468.562.500	100		100	-	100	1.339.812.500	
				Peningkatan pelayanan pemanfaatan persandian, perlengkapan dan administrasi (%)	80	82	4.906.428.000	84	5.151.749.400	86	5.409.336.870	88		90	-	90	15.467.514.270	Bagian Umum dan perlengkapan
				Persentase SKPD yang prasarananya memenuhi standar (%)	80	80		89		90		95		100		100	-	
4	01	30	Program peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perakonomian		100	100	2.885.280.000	100	3.029.544.000	100	3.181.021.200	100	147.400.000	100	154.770.000	100	9.398.015.200	Badan Pendapatan Daerah
4	01	35	Program peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daerah		100								117.566.000	100	123.444.300	100	241.010.300	Badan Pendapatan Daerah
4	01	20	Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan (%)	5	10	463.490.000	33	1.003.492.500	56	1.041.542.475	79	75.145.400	100	1.148.439.288	100	3.732.109.663	Inspektorat
				Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu (%)	5	8,60		30,93		53,95			77,67		100		100	-
				Persentase kasus pengaduan masyarakat yang dituntaskan	5	20		40		60		80		100		100	-	
4	01	21	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawas		5	20		40		60		80		100		100	-	
				Pemberian beasiswa bagi putra/i anggota korpri (%)	5	7		10		13		17		20		20	-	Sekretariat KORPRI
				Pemberian uang duka wafat bagi anggota korpri yang meninggal (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
				Pemberian uang purna tugas bagi anggota korpri yang meninggal (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	Sekretariat KORPRI
4	01	15	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Ketepatan Pelaksanaan pembahasan APBD (%)	85%	90%	2.478.400.000	95%	2.602.320.000	100	2.732.436.000	100	6.022.334.500	100	6.323.451.225	100	20.158.941.725	Sekretariat DPRD
				Persentase Aspirasi masyarakat yang dibahas (%)	100	100		100		100		100		100		100	-	
				Cakupan peraturan yang dibahas dan ditetapkan (%)	85	90		95		100		100		100		100	-	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	02		Pengawasan															
4	01	20	Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah	Ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan (%)	75	80	425.000.000	85	446.250.000	90	468.562.500	90	513.667.850	95	539.351.243	95	2.392.831.593	Bagian Pembangunan
				Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparaturnya secara tepat waktu (%)	5	8,60		30,93		53,95		77,67		100		100	-	
				Persentase kasus pengaduan masyarakat yang dituntaskan	5	20		40		60		80		100		100	-	
4	03		Perencanaan															
4	03	15	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase dokumen data dan informasi yang tersaji (%)	100	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	3.332.484.500	100	250.000.000	100	3.982.484.500	Bapelitbang
4	03	16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama	30	30	250.000.000	32	275.000.000	35	300.000.000	36	382.669.000	38	300.000.000		1.507.669.000	
4	03	19	Program Perencanaan Pengerangan Kota-kota Menengah Besar	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah	7	7							150.000.000	8	475.000.000	36	625.000.000	
4	03	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah	7	7	500.000.000	7	500.000.000	7	450.000.000	7	500.000.000	8	1.990.254.400	36	3.940.254.400	
4	03	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	0	0		1		1	300.000.000	1		1	572.932.100	1	872.932.100	
4	03	23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya	0	0		1		1		1	300.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000	
4	03	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Prasarana wilayah dan Sumber daya alam	0	0		1		1	500.000.000	1		1	80.957.100	1	580.957.100	
4	04		Keuangan															
4	04	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan akuntabel (%)	100	100	2.885.280.000	100	3.029.544.000	100	3.181.021.200	100	3.452.832.950	100	3.625.474.598	100	16.174.152.748	Badan Pendapatan Daerah
4	05		Kepegawaian															
4	05	26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai(%)	80	80	2.466.899.750	82	2.590.244.738	85	2.719.756.974	90	1.988.655.339	95	2.088.088.106		11.853.644.907	BKD dan Pengembangan SDM
				Terselenggaranya analisa kebutuhan pegawai	600 org	600 org		650 org		700 org		750 org		800 org			-	
4	05	25	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan struktural	241 org	265 org	611.794.300	150 org	642.384.015	150 org	674.503.216	150 org	708.228.377	150 org	743.639.795		3.380.549.703	BKD dan Pengembangan SDM
4	05	25	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		30 org		35 org		40 org		40 org		40 org			-	

Tabel 2.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO	Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1 : Meningkatkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Sikka yang Berkeadilan, Tentram dan Tertib								
1.1	Iklim Politik Yang Kondusif dan Partisipasi Politik Rakyat (%)	45,30%	55,55%	65,80%	76,06%	86,30%	96,55%	96,55%
1.2	Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%)	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah								
2.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,26	4,5	5	4,33	4,5	5	5
2.2	Inflasi (%)	6,49	5,2	5,1	4,89	4,7	6,5	6,5
2.3	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	6.694.324	6.995.569	7.345.347	7.749.341	8.214.302	8.748.231	8.748.231
2.4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	34,53%	40,98%	41,72%	42,47%	43,23%	44,01%	44,01%
2.5	Kontribusi Sektor Kelautan Perikanan terhadap PDRB (%)	6,79%	6,91%	7,03%	7,16%	7,29%	7,42%	7,42%
2.6	Produksi Sektor Pertanian (Ton EQ. Beras)	63.003	64.401	65.696	66.353	67.016	67.686	67.686
2.7	Produksi Sub Sektor Perkebunan - Kakao (Ton)	7.151	8.031	8.471	8.646	8.826	9.011	9.011
2.8	Produksi Sub Sektor Perkebunan - Kelapa (Ton)	7.099	7.254	7.339	7.429	7.524	7.624	7.624
2.9	Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan (Ton)	11.946	12.391	12.857	13.333	13.830	14.345	14.345
2.10	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	0,65%	0,68%	0,70%	0,73%	0,75%	0,78%	0,78%
2.11	Meningkatnya Target PAD (Juta Rupiah)	42.903,05	46.534	51.653	57.335	63.642	70.643	70.643
2.12	Nilai realisasi investasi (swasta) PMDN	2.780.700.160	2.780.700.160	2.836.314.163	2.893.040.446	2.950.901.255	3.009.919.281	3.009.919.281
2.13	Nilai realisasi investasi (swasta) PMA (US\$)	3.800.000\$	3.800.000\$	3.876.000\$	3.953.520\$	4.032.590\$	4.113.242\$	4.113.242\$
2.14	Angka Kemiskinan (%)	12,83%	12,00%	11,50%	11,00%	12,02%	11,74%	11,74%
2.15	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	59,93%	59,95%	59,95%	59,95%	59,98%	59,98%	59,98%
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat								
Pendidikan								
3.1	Angka Melek Huruf	92,23	93	93,8	94,6	95,4	96,2	96,2
3.2	Tingkat kelulusan SD/MI	98,93	98,95	98,96	98,97	98,98	99	99
3.3	Tingkat Kelulusan SLTP/MTS	95,67	95,8	95,85	95,9	95,95	96	96
3.4	Tingkat Kelulusan SMU/MA	91,7	91,75	91,8	91,85	91,9	91,95	91,95
3.5	Tingkat Kelulusan SMK	95,44	95,6	95,8	96	96,2	96,4	96,4
3.6	Angka Partisipasi Murni SD/MI	94,08	94,5	95	95,5	96	96,5	96,5
3.7	Angka Partisipasi Murni SLTP/MTS	74,82	75,2	75,6	76	76,4	76,8	76,8
3.8	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	113,98	113,5	113	112,5	112	111,5	111,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.9	Angka Partisipasi Kasar SLTP/MTS	85,8	86,2	86,6	87	87,4	87,8	87,8
Kesehatan								
3.12	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	97/100.000 KH	115/100.000 KH	KH	95//100.000 KH	85//100.000 KH	80//100.000 KH	80//100.000 KH
3.13	Angka Kematian Bayi(per 1.000 KH)	11/1000 KH	11/1000 KH	10/1000 KH	9/1000 KH	8/1000 KH	7/1000 KH	7/1000 KH
3.14	Prevalensi gizi kurang (%)	22,08	19	17	15	14	13	13
3.15	Prevalensi gizi buruk (%)	0,8	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
3.16	Stunting (%)	45	41	39	37	35	32	32
3,17	Prevelensi HIV-Aids (%)	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,35
3.18	Desa/Kelurahan Universal Child Immunisation (%)	83	85	86	87	88	90	90
3.19	Annual Parasite Incidence	39/1000	30/1000	25/1000	20/1000	15/1000	12/1000	12/1000
3.20	Cure Rate TBC (%)	80	84	86	88	89	90	90
3.21	Desa Stop BABS	76	87	95	105	112	120	120
3.22	Desa STBM (%)	10	28	43	59	74	90	90
3.23	Indeks Pembangunan Manusia (%)	68,22	70	72	74	76	78	78
3.25	Rasio rumah layak huni (%)	24	25,5	27	28,5	30	31,5	33
3.26	Proporsi Rumah Tangga yg dilayani listrik	29.025	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000	40.000
3.27	Cakupan layanan air minum (%)	46,04	47,04	48,04	49,04	50,04	51,04	512,04
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi Yang Baik dan Bersih								
4.1	Indeks kepuasan masyarakat	C	C	C	B	B	B	B
4.2	Hasil Penilaian Audit Eksternal	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.3	Volume pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berbasis teknologi informasi (%)	0	50	100	100	100	100	100
4.4	Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	C	C	C	CC	CC	B	B
4.5	Jumlah jenis perijinan yang diterbitkan	21	22	23	24	25	26	26
4.6	Lamanya waktu pengurusan perijinan (hari)	14	10	8	6	5	4	4

BAB III

PENUTUP

Dokumen Peraturan Bupati Sikka ini berisikan tentang Penyesuaian Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 menjabarkan perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan, perkembangannya dan sasaran pembangunan dalam periode tahun 2013-2018, serta bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program pembangunan.

Dokumen Peraturan Bupati Sikka ini menjadi landasan yang menjadi rujukan dalam penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Selama kurun waktu dua tahun kedepan, berbagai program pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 dapat dilaksanakan dengan konsisten oleh Perangkat Daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat.